

# Bunga Rampai Potret Bencana

dari Perspektif Hukum, Sosial, dan Budaya

Harifuddin, Faidah Azuz, Akhyar Nasution,  
Afita NF, Aloysius Jondar,  
Ningsih, Indra Kristian, Andi Hartati  
editor, Euis Emilia





**Bunga rampai : Potret Bencana dari Perspektif Hukum,  
Sosial, dan Budaya**

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 110 + vi

Cetakan : Desember 2022

ISBN : 978-623-8126-12-5 (EPUB)

Penulis : **Harifuddin, Faidah Azuz, Akhyar Nasution,  
Afita NH, Aloysius Jondar, Sri Ningsih,  
Indra Kristian, Andi Hartati.**

Editor : Euis Emilia

Sampul : team nuta .

Layout : @setiawan

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

[nutamediajogja@gmail.com](mailto:nutamediajogja@gmail.com); 081228153789

@2022, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras  
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Selama kurun waktu satu dekade ini, kejadian bencana di sekitar kita terlihat makin banyak dan kemunculannya tidak bisa disangka-sangka. Realitas kebencanaan selama ini pun telah menimbulkan dampak yang besar dan sangat merugikan manusia. Sarana dan prasarana hancur dimana-mana, kehilangan jiwa sudah tidak terhitung, kehancuran lingkungan sangat memilukan, tekanan psikis melanda banyak manusia terutama di wilayah rawan bencana. Situasi ini meniscayakan keadaan darurat dan kesiapsiagaan semua komponen masyarakat. Para ilmuwan pun tidak tinggal diam dan turun tangan memikirkan dan menemukan solusi mengatasi problematika kebencanaan tersebut. Dalam konteks inilah, buku ini merepresentasikan gagasan para ilmuwan sosial, budaya, dan hukum dengan perspektif masing-masing dalam memandang kebencanaan tersebut.

Buku ini mengandung berbagai sudut pandang keilmuan. Oleh karena itu, buku yang ditulis oleh para akademisi dari ragam latar keilmuan ini menjadi perlu dijadikan rujukan bagi publik khususnya bagi pengambil kebijakan dalam menentukan program kegiatan yang akan ditempuh.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak khususnya pemerintah atau dinas terkait kebencanaan dan kepariwisataan.

Yogyakarta, April 2022

Penyusun

Harifuddin, et.al



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1	
KELOMPOK SOSIAL DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM BERBASIS PARIWISATA .....	1
Harifuddin, Indra Kristian .....	1
BAB 2	
HABITUASI SOLIDARITAS SOSIAL KEBENCANAAN .....	11
Faidah Azuz .....	11
BAB 3	
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK) .....	26
Abdullah Akhyar Nasution.....	26
BAB 4.	
KOLABORASI PENTAHELIX DALAM BENCANA .....	44
Afita Nur Hayati .....	44
BAB 5	
PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL .....	56
TERHADAP BENCANA.....	56
<i>Aloysius Jondar</i> .....	56
BAB 6.	
MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL .....	70
Sri Ningsih .....	70
BAB 7	
RESTRUKTURISASI ORGANISASI KEBENCANAAN .....	89
Indra Kristian, Harifuddin .....	89

# BAB 1

## KELOMPOK SOSIAL DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM BERBASIS PARIWISATA

Harifuddin, Indra Kristian

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia saat ini dikenal dengan istilah '*Ring of Fire*' atau negara cincin api. Istilah ini mengandung makna bahwa Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi oleh gunung berapi atau memiliki potensi gunung berapi yang banyak dan siap-siap memuntahkan isinya setiap waktu dengan tidak disangka-sangka. Istilah ini sebenarnya hanya bagian kecil dari sebuah gambaran bahwa negara ini memang memiliki potensi bencana yang besar selain gunung berapi. Masih teringat dengan jelas bagaimana gempa bumi yang berlangsung beberapa kali seperti di Nusa Tenggara Timur, di Palu Sulawesi Tengah, di Nusa Tenggara Barat, di Mamuju Sulawesi Barat, termasuk gempa bumi Yogyakarta beberapa tahun silam. Gempa bumi tersebut sering bersamaan dengan terjadinya Tsunami air laut yang menyebabkan dampak yang sangat dahsyat seperti di Aceh, di Palu yang menimbulkan korban jiwa hingga ratusan penduduk.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa bencana merupakan kejadian atau rangkaian kejadian yang memiliki potensi ancaman dan menimbulkan masalah kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga berkonsekuensi terhadap timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak secara psikologis.

Kerugian akibat bencana di Indonesia sudah tidak terhitung banyaknya di setiap kejadian bencana. Kerugian tersebut meliputi kerugian sarana dan prasarana, kerugian,



psikis, hingga korban hewan ternak hingga korban manusia. sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terluka Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang.

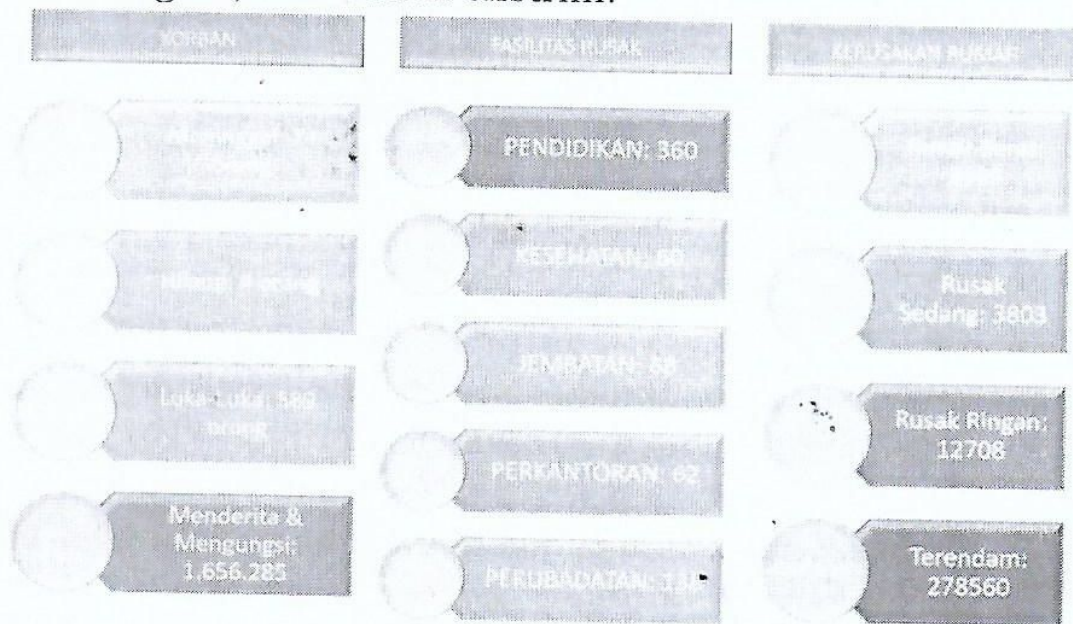
No.	Jenis Korban	Jumlah Korban Meninggal, Hilang, dan Terluka Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang		
		2018	2019	2020
1.	Meninggal dan Hilang	1,98	0,18	8,34
2.	Terluka	8,01	1,25	0,2
3.	Menderita dan Mengungsi	3 931	1 935	2 387,62

Sumber: BPS, 2021

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana. Jumlah korban terdampak (luka dan pengungsi) adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (BPS, 2021).



Selanjutnya, data-data di atas digambarkan kembali secara lengkap dalam bentuk infografis dengan indikator tambahan seperti kerusakan fasilitas dan kerusakan rumah. Indikator tersebut dihitung data terbaru yaitu tahun 2021 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dampak kejadian bencana tersebut berasal dari semua jenis kejadian seperti bencana banjir, bencana gunung berapi, bencana gempa bumi, bencana tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, dan cuaca ekstrim.



Gambar 1. Data kerusakan akibat bencana.(BNPNB, 2022)

Melihat besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) dan jajarannya hingga level daerah turun tangan melakukan antisipasi terprogram seperti mitigasi bencana. Pemerintah memprioritaskan penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia baik di level aksi lapangan maupun di level kebijakan.

Semua kejadian bencana tersebut berdampak di berbagai bidang kehidupan. Kerusakan bangunan sekolah menyebabkan siswa tidak bisa melangsungkan proses pendidikan. Kerusakan jalan raya dapat membuat mobilitas ekonomi terganggu. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan polusi udara berskala luas yang bila udaranya



terhirup berpotensi menimbulkan penyakit paru-paru, dan sebagainya.

Bidang pariwisata juga memperoleh dampak besar kejadian bencana. Sebuah destinasi wisata yang tertata dengan rapi dan indah bisa hancur karena bencana banjir, atau bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Situasi ini menyebabkan terhentinya arus wisata kemudian menjadi sebab terhentinya roda perekonomian masyarakat. Selain itu, menyebabkan juga kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem kehidupan masyarakat setempat.

Penanggulangan bencana memiliki beberapa fokus, salah satunya adalah pengurangan resiko bencana yang berbeda dengan mitigasi bencana. Pengurangan resiko bencana (PRB) atau disaster risk reduction (DDR) adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana (Asmara & Suyono, 2009). Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Naryanto, 2001; Nurdiansyah., 2021; Widiyanto, 2021). Dengan demikian, kajian keduanya tidak terlalu berbeda dan saling melengkapi.

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir meliputi banyak aspek dan saling mempengaruhi dengan aspek lainnya. Salah satu dampak yang menarik kajian adalah dampaknya terhadap pariwisata khususnya obyek wisata. Obyek wisata merupakan salah satu nafas bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lokasi wisata dapat menjadi sumber nafkah bagi banyak warga. Bila sebuah obyek wisata tidak berfungsi karena terdampak oleh banjir maka banyak masyarakat akan terganggu mata pencahariannya. Dengan demikian, penting bagi warga untuk melindungi sebuah



objek wisata dengan banyak cara, salah satunya melalui pengurangan resiko bencana.

Pengurangan resiko bencana merupakan langkah penting dalam mengatasi dampak banjir yang lebih besar. Ada banyak stakeholder yang boleh terlibat di dalam penanggulangan banjir dan dikategorikan sebagai penanggulangan struktural dan non-struktural. Penanggulangan struktural merupakan domain pemerintah terutama BPBD sementara penanggulangan non-struktural merupakan domain selain pemerintah seperti masyarakat, LSM, lembaga luar negeri, dan sebagainya (Carolina, 2018). Tulisan ini memfokuskan kajian pada pengarusutamaan peran kelompok sosial masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. Hal ini penting karena masyarakat perlu diberdayakan dalam mengatasi masalah hidupnya sendiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah dalam mengatasi persoalan. Pemerintah tetap membantu masyarakat tetapi bukan lagi sebagai aktor utama, melainkan berfungsi sebagai fasilitator dan mediator.

## **B. Kelompok Sosial, Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan**

Sebelum orde reformasi berkuasa, eksistensi masyarakat hampir tidak terlihat. Mereka berada di posisi objek pembangunan dan menjadi penikmat semata atas hasil pembangunan. Bahkan, masyarakat tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan dalam pembangunan. Mereka pun tidak dibiarkan terlibat di dalamnya karena semua sudah diatur oleh penguasa. Masyarakat hanya perlu patuh dan tunduk atas segala yang dilakukan pemerintah terhadap mereka. Pada akhirnya, situasi ini menyebabkan masyarakat menjadi organisme 'bisu' atas realitas sosial dirinya sendiri dan orang lain.

Kemenangan Orde reformasi yang menggantikan orde baru dan mengubah paradigma pembangunan berbasis



pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bukan lagi ditempatkan sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek pembangunan. Masyarakat merupakan pelaksana pembangunan sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pendukung dan penyedia infrastruktur. Konsep utamanya adalah masyarakat membangun dengan tujuan menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Merekalah yang harus menemukan solusi atau jalan keluar, karena mereka yang menjalani masalah tersebut bukan pemerintah (Hadi et al., 2019).

Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat merupakan bentuk reaksi atas 'kebisuan' masyarakat dan sebagai tindak lanjut atas penguatan eksistensi masyarakat di era reformasi. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut dibentuk oleh masyarakat atau komunitas mereka dengan maksud mengatasi semua persoalan mereka seperti persoalan sosial, persoalan lingkungan, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, dan sebagainya (Hidayah, 2015). Persoalan-persoalan ini membutuhkan banyak kelompok masyarakat setempat sesuai tujuannya dan bukan hanya satu kelompok yang dibuat untuk mengatasinya.

Pembentukan kelompok masyarakat untuk pengurangan resiko bencana menjadi penting sekaligus urgen karena bencana memiliki banyak sumber penyebab. Misalnya, wilayah yang rawan banjir menyebabkan bencana banjir, wilayah yang rawan gempa menjadi bencana gempa, bencana tsunami, bencana kebakaran hutan, bencana kekeringan, bencana gunung api dan sebagainya (Waskitaningsih, 2012). Pada masing-masing wilayah tersebut, masyarakatnya sudah terbiasa dengan bencana masing-masing sehingga kelompok masyarakat yang dibentuk kemungkinan besar dapat menemukan strategi untuk menanggulangi dampak yang lebih besar dibanding sebelumnya (Arifianto & Virhani, 2009). Inilah yang dapat dikategorikan sebagai pengurangan resiko bencana.



Kelompok masyarakat yang dibentuk dalam sebuah masyarakat merupakan warga yang dipilih dan dipercaya oleh semua masyarakat untuk mengemban peran dan tanggungjawab menunaikan tujuan kelompok tersebut. Kelompok tersebut melakukan analisis dan pemetaan terkait kondisi lokal mereka kemudian mengambil langkah antisipasi minimal sebagai upaya non-struktural selain upaya struktural yang akan ditempuh oleh pemerintah. Selain itu, kelompok penanggulangan bencana tersebut juga dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat lainnya atau terbentuknya kelompok sejenis untuk persoalan sosial lainnya seperti pemuda pencinta lingkungan, pemuda anti narkoba, pemuda pencinta wisata dan sebagainya. Bahkan, kelompok-kelompok yang berbeda tujuan tersebut dapat melakukan kolaborasi untuk hal-hal yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat dimana kelompok penanggulangan bencana bekerjasama dengan kelompok pemuda wisata dalam melakukan perlindungan terhadap destinasi wisata dari ancaman bencana jenis apapun yang sering terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, kelompok tersebut dapat memperluas keterlibatannya dengan memasukkan warga masyarakat lainnya untuk terlibat di dalam program sebagai wujud partisipasi sosial (Bahri & Halim, 2019). Mereka dapat melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan terkait tujuan kelompok tersebut agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat (Halim et al., 2021).

Penguatan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah pemberdayaan. Penguatan dilakukan dengan memberikan peran dan tanggungjawab di dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sekaligus menciptakan situasi yang mengkondisikan warga agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.



### C. Kesimpulan

Penanggulangan bencana juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat. Pembentukan kelompok sosial merupakan salah satu langkah antisipasi terhadap dampak bencana terutama dampak pada bidang pariwisata. Kelompok masyarakat memang tidak bisa menghilangkan dampak tetapi dapat mengurangi resiko yang lebih besar agar perbaikannya tidak membutuhkan biaya yang lebih besar. Dalam bidang pariwisata, pengurangan resiko bencana merupakan hal yang urgen karena harus ada jaminan keselamatan terhadap para pengunjung. Dalam konteks inilah peran kelompok sosial sangat diperlukan demi kemaslahatan bersama dalam semua pelaku pariwisata, antara pengunjung, pengelola objek wisata, pedagang, dan sebagainya.

### Daftar Pustaka

- Arifianto, S., & Virhani, M. R. (2009). *Informasi Bencana Dan Budaya Lokal (Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan)*.
- Asmara, V., & Suyono, P. (2009). *Pengurangan Risiko Bencana Banjir Berbasis Masyarakat* (Issue November).
- Bahri, S., & Halim, H. (2019). *Lembaga Adat dan Partisipasi Sosial*. Yayasan Inteligencia Indonesia.
- BNPNB, B. (2022). *Jumlah kejadian per jenis bencana*. Gis. <https://gis.bnpb.go.id/>
- BPS, B. (2021). *Data Statistik Indonesia*. BPS Press.
- Carolina, M. (2018). Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. *Buletin APBN Oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*.
- Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Gempabumi. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i1.1476>



- Halim, H., Ibrahim, I., & Zainuddin, R. (2021). Pelatihan Pemetaan Potensi Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 103-109. <https://doi.org/10.52072/abdine.v1i2.207>
- Hidayah, K. (2015). Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah (Kajian terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas). *Jurnal Borneo Administrator*.
- Naryanto, H. S. (2001). Mitigasi bencana gempa (kasus gempa di Tarutung- Sarulla, Sumatra Utara. *Prosiding Pelatihan Mitigasi Bencana Jakarta Tahun 2001*.
- Nurdiansyah. (2021). *Kearifan Lokal Sumber Mitigasi*. 6 Februari.
- Waskitaningsih, N. (2012). *Kearifan Lokal Masyarakat Sub-Sistem Drainase Bringin Dalam Menghadapi Banjir*. 8(4), 383-391.
- Widianto, E. (2021). *Begini Mitigasi Gempa dan Tsunami di Malang*. 10 April.



## **Biografi :**

**Harifuddin**, adalah Dosen Tetap pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar. Menempuh Pendidikan S2 Sosiologi Tahun 1999-2001, dan S3 Tahun 2009 - 2016 prodi Sosiologi dengan kajian Sosiologi Bencana. Banyak menulis tentang Sosiologi Masyarakat Nelayan, dan Sosiologi Agama, Sosiologi Komunikasi, Sosiologi Bencana berbasis Pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. No. Kontak: 085255221150/ email: [harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id](mailto:harifuddin.halim@universitasbosowa.ac.id).

**Indra Kristian**, menyelesaikan pendidikan Strata 1- Sarjana Ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Al ghifari (UNFARI) Bandung, dan Strata-1 teknik informatika STIMIK Triguna Utama, Strata 2- Magister Ilmu Administasi dan kebijakan publik Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan (UNPAS), dan Strata 3- Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Pasundan (UNPAS). Senior Lecturer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al ghifari fokus penulis pada kajian Kebijakan Publik, Organisasi Publik, Otonomi daerah, dan Metode Penelitian. Selain aktif menjadi Narasumber diberbagai forum ilmiah penulis juga aktif sebagai Tenaga Ahli dalam berbagai penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di beberapa Pemerintahan Daerah, serta sering di daulat sebagai assessor untuk uji kompetensi jabatan pratama Penulis adalah Team Editorial jurnal "Dialektika PIANI", dan reviewer berbagai jurnal nasional, Penulis terhubung melalui : [technician2007@gmail.com](mailto:technician2007@gmail.com)  
HP :08112382226



Selama kurun waktu satu dekade ini, kejadian bencana di sekitar kita terlihat makin banyak dan kemunculannya tidak bisa disangka-sangka. Realitas kebencanaan selama ini pun telah menimbulkan dampak yang besar dan sangat merugikan manusia. Sarana dan prasarana hancur dimana-mana, kehilangan jiwa sudah tidak terhitung, kehancuran lingkungan sangat memilukan, tekanan psikis melanda banyak manusia terutama di wilayah rawan bencana. Situasi ini meniscayakan keadaan darurat dan kesiapsiagaan semua komponen masyarakat. Para ilmuwan pun tidak tinggal diam dan turun tangan memikirkan dan menemukan solusi mengatasi problematika kebencanaan tersebut. Dalam konteks inilah, buku ini merepresentasikan gagasan para ilmuwan sosial, budaya, dan hukum dengan perspektif masing-masing dalam memandang kebencanaan tersebut.

Buku ini mengandung berbagai sudut pandang keilmuan. Oleh karena itu, buku yang ditulis oleh para akademisi dari ragam latar keilmuan ini menjadi perlu dijadikan rujukan bagi publik khususnya bagi pengambil kebijakan dalam menentukan program kegiatan yang akan ditempuh



Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari  
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172  
Email Marketing Cs.: [nutamedijogja@gmail.com](mailto:nutamedijogja@gmail.com)  
IKAPI No. 135/DIY/2021



ISBN 978-623-8126-12-5 (EPUB)



9 786238 126125